

CEGAH MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN MBG, OMBUDSMAN RI TEMUI BGN

Selasa, 04 Februari 2025 - Imanda Kartika Sari

Jakarta - Sebagai bentuk upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana di Kantor Badan Gizi Nasional pada Senin (4/2/2025).

Yeka menjelaskan bahwa program Makan Gizi Gratis ini merupakan bagian dari rangkaian pelayanan publik baik barang, jasa dan administrasi sehingga dalam proses penyelenggaraannya perlu dipastikan tidak terjadi maladministrasi. Terlebih saat ini program Makan Bergizi Gratis tengah mendapatkan perhatian besar dari masyarakat baik sehingga pengawasan ini penting demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Makan Bergizi Gratis ini sebagai bentuk layanan publik dan kebijakan pemerintah yang dirasakan manfaatnya oleh publik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya masih terdapat catatan dan potensi permasalahan," ucap Yeka.

Yeka menambahkan masih adanya animo negatif dari publik terkait permasalahan tata kelola dan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis ini dapat berjalan baik sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tata kelola dalam program ini telah mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan layanan publik yang baik atau tidak.

"Oleh karena itu, dalam rangka mendukung agenda pemerintah untuk pencapaian Prioritas Nasional ke 4 yakni memperkuat pembangunan SDM dan Prioritas Nasional ke-7 yaitu memperkuat reformasi dan birokrasi. Ombudsman RI pada tahun ini akan melakukan pengawasan pelayanan publik pada proses penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis ini," ucap Yeka.

Ombudsman RI akan menelaah beberapa aspek dalam proses penyelenggaraannya baik dalam tahap perencanaan, pemilihan penyedia, monitoring evaluasi hingga pelaksanaan pekerjaannya.

Sementara itu, Dadan Hidayana menyambut baik dukungan Ombudsman RI dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis. "Pencegahan ini tentunya penting bagi kami karena tidak mungkin Badan Gizi Nasional mengawasi sendiri. Kami tetap perlu pengawasan yang datang dari luar," tutup Dadan.